

Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan

JKAKP, 2 (1) (2023): 37-43

E-ISSN 2829-4793 | DOI 10.32734/jkakp.v2i1.13421

Available online https://talenta.usu.ac.id/jpr

Beras Sebagai Komoditas Politik Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Faiz Albar Nasution[1], Yofiendi Indah Indainanto[2], Piki Darma Kristian Pardede[3]

[1]Universitas Sumatera Utara, Indonesia
[2]Universitas, Semarang, Indonesia
[3]Universitas Darma Agung, Indonesia

Abstrak

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan sektor pertanian menjadi penting. Tidak hanya mencakup tentang ketahanan pangan, melainkan menjadi komoditas politik. Beras sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia, digunakan politisi sebagai media kampanye yang dapat menarik dukungan. Anggapan beras dianggap sebagai komoditas strategis dapat digunakan sebagai komoditas politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan beras sebagai komoditas politik menjelang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan *desk research* dengan mengumpulkan data secara digital. Hasil penelitian menunjukan beras memiliki peran yang signifikan dalam politik, mulai komoditas strategis untuk mencapai ketahanan pangan maupun sebagai alat kebijakan politik, media kampanye. Beras dinilai menjadi representatif dalam melihat kepedulian politisi kepada petani sebagai upaya menciptkaan kesejahteraan. Beras selalu menjadi fokus dalam rencana kebijakan, pedebatan politik dan menjadi strategi penting politisi menunjukan arah kebijakan. Pentingnya komoditas beras dalam politik erat kaitan dengan sejarah panjang yang menempatkan beras sebagai simbol identitas nasional. Penting melihat urgensi beras sebagai komoditas pangan dibanding komoditas politik.

Kata Kunci: Beras, Komoditas politik, Pemilihan Umum

Abstract

As an agrarian country, Indonesia places great importance on the agricultural sector. Not only does it cover food security, but it has become a political commodity. Rice, as a staple of Indonesian society, is used by politicians as a campaign medium that can attract support. The assumption that rice is a strategic commodity can be used as a political commodity. This study aims to determine the relationship between rice as a political commodity ahead of the General Election. The method used is desk research by collecting data digitally. The results showed that rice has a significant role in politics, starting from a strategic commodity to achieve food security and a political policy tool, campaign media. Rice is considered representative in seeing politicians' concern for farmers as an effort to create welfare. Rice has always been the focus of policy plans, political debates and has become an essential strategy for politicians to show policy direction. The importance of rice in politics is closely related to the long history that places rice as a symbol of national identity. It is essential to see the urgency of rice as a food commodity rather than a political commodity.

Keywords: *Rice, Political Commodities, General Elections*

How to Cite: Nasution, F.A., Indainanto, Y.I., & Pardede, P.D.K., **(**2023). Beras Sebagai Komoditas Politik Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 2 (1): 37-43

*Corresponding author: Faiz Albar Nasution
E-mail: faiz@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Beras sebagai komoditas pertanian memiliki keterikatan erat dengan politik yang telah memberikan pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat. Indonesia dengan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian pada Februari 2022 yang berprofesi sebagai petani mencapai 9.749.093 jiwa, dengan kinerja mengalami peningkatan sebesar 23,30 persen yang dihitung berdasarkan bulanan dan 11,69 persen yang dihitung secara tahunan (Setyaningrum, 2022). Artinya sektor pertanian memiliki posisi tawar yang tinggi dalam panggung politik. Terlebih beras sebagai kebutuhan pokok, sering dijadikan komoditas politik dalam kampanye sebagai upaya mempengaruhi keputusan pemilih. Dengan luas panen padi pada 2022 mencapai sekitar 10,45 juta hektar yang mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar atau 0,39 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar. Sementara produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,54 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 184,50 ribu ton atau 0,59 persen dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 31,36 juta ton (Bps.go.id, 2023). Kondisi tersebut sangat memungkinkan banyak politisi menggunaknya untuk kampanye. Dalam pemilihan umum, beras telah menjadi media kampanye baik calon Legislatif ataupun Eksekutif di Indonesia (Herin, 2019),

Beras sebagai komoditas politik dinilai menjadi setrategi efektif dalam menarik perhatian masyarakat terutama petani. Bagi politisi, beras sebagai media berkampanye sebagai pendanaan politik yang murah. Dalam perkembangannya, beras merupakan komoditas penting di Indonesia dan telah menjadi topik pembicaraan dalam wacana politik. Kebijakan, rencana kerja tentang beras sangat berpengaruh luas di Indonesia. Kedudukan politikus dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam jika ia dianggap mendukung kebijakan yang tidak membela petani seperti impor beras ketimbang swasembada (Pahlevi, 2019). Pada tahun 2018 dan 2023, impor beras di Indonesia meningkat drastis satu tahun menjelang Pemilu. Banyak yang mengkaitkan dengan upaya partai politik yang mencari dana untuk kampanye mereka (Ahdiat, 2023), (Michella, 2023). Banyak janji-janji yang dibuat oleh politisi untuk mengurangi atau menghentikan impor beras pada masa kampanye (Reza, 2014), (Komara, 2019; (kumparan.com, 2023).

Indonesia sebagai produsen beras terbesar ketiga di dunia, namun swasembada beras masih dipertanyakan. Posisi tawar politik yang tinggi, seringkali menempatkan beras sebagai representatif dalam melihat kesejahteraan masyarakat kecil. Sejak awal abad ke 19, dalam menentukan kebijakan kesejahteraan selalu difokuskan dalam memperbaiki pertanian padi. Ide kesejahteraan ini pada akhirnya selalu mengalami perkembangan hingga pasca kemerdekaan (Refiyanto, 2021). Selain itu, politik beras dinilai sebagai representatif gerakaan sosial oleh berbagai kelompok teretntu (Mahardika & Ramadhan, 2020).

Sejak tahun 1967, pemerintah Orde Baru menjadikan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi di tanah air. Saat itu, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi beras. Kecenderungan beras yang produksinya meningkat dinilai oleh pemerintah disebabkan beras memiliki sifat yang sangat kompleks karena menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Anggraeni, 2013). Dalam konteks politik praktis, pertarungan rencana kebijakan seringkali digunakan untuk media kampanye politik yang memunculkan perdebatan politik. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui hubungan beras sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber yang ada, seperti buku, artikel, website, dan database, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini juga dikenal sebagai penelitian sekunder dan merupakan cara hemat biaya untuk mendapatkan data yang relevan dari berbagai saluran (surveysparrow.com,

2023; March, 2022). Ada dua jenis utama metode penelitian pustaka: kualitatif dan kuantitatif (Owa, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis data non-numerik, seperti teks, gambar, audio, sedangkan penelitian meja kuantitatif melibatkan analisis data numerik (Owa, 2023). Dalam memastikan reliabilitas dan validitas temuan desk research, peneliti menggunakan langkah sebagai berikut; Pertama, menentukan pertanyaan penelitian untuk memastikan bahwa penelitian terfokus dan relevan. Kedua, Identifikasi sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, Evaluasi kualitas sumber. Keempat, Analisis data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan pertanyaan penelitian dan mendukung temuan penelitian, selanjutnya menuliskan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beras Simbol Identitas Nasional

Beras memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Posisi beras sebagai makanan pokok sering dikaitkan sebagai bentuk ketahanan nasional. Hal tersebut mendorong beras sebagai makanan pokok di Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Pengaruh ketersediaan beras, keberhasilan beras tidak hanya bermakna dalam nilai makanan itu sendiri. Melainkan melebar keranah politik. Bagi aktor yang dapat mengendalikan pasokan dan harga beras dapat memberi politisi pengaruh yang signifikan atas para pemilih, khususnya di daerah pedesaan dimana pertanian merupakan industri utama.

Kondisi tersebut menempatkan komoditas beras secara historis telah menjadi alat politik yang penting di Indonesia. Politisi dapat berjanji untuk meningkatkan subsidi bagi petani beras atau menerapkan kebijakan untuk menstabilkan harga beras menjelang Pemilu (Emond, 2021). Konsumsi beras nasional di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, dan diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Tahun 2021-2022. Indonesia jadi negara dengan konsumsi beras global terbesar keempat di dunia dengan konsumsinya mencapai 35,3 juta (Muhamad, 2023). Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per Juli 2023, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton. Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari-September 2023 diproyeksikan 25,64 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan produksi beras periode sama tahun lalu yang tercatat 26,17 juta ton. Artinya dalam konteks politik, beras memiliki nilai komoditas pasar yang tinggi dalam mencari dukungan masyarakat.

Politisi tidak serta-merta menilai beras kebutuhan pangan yang harus terpenuhi, melainkan dapat menjadi komoditas politik yang menyerang lawan politik atau mendapat dukungan dengan serangkaian strategi. Lebih lanjut, dalam kebijakan impor beras dimana dijadikan alat untuk mempolititiasi kepentingan tersebut. Meskipun dengan mengimpor beras, negara ini memenuhi sebagian besar permintaan berasnya di dalam negeri. Kestabilan rantai pasokan dalam negeri sangat penting untuk pasokan beras yang stabil, terjangkau, dan dapat diakses. Bagi kelompok yang menentang kelompok yang berkuasa, impor beras dapat dijadikan alat untuk menyarang lawan politiknya dengan dalil tidak peduli terhadap kesejateraan petani, harga bisa menjatuhkan beras lokal dan tidak berpihak pada petani. Bagi kelompok pendukung, impor beras dapat memberikan jaminan ketersediaan pangan yang dapat meningkatkan gizi dan menstabilkan Harga. Dua narasi tersebut kerapkali muncul dalam panggung politik pada Pemilu di Indonesia.

Dampak negatif yang menempatkan beras hanya sebagai komoditas politik, dapat menyebabkan pengabaian terhadap isu yang lebih luas yang dihadapi sektor pertanian. Seperti persoalan lahan yang semakin menyusut, popuk, inovasi dan pertanian berkelanjutan. Posisi petani dalam arena politik memiliki daya tawarnya menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam konteks komoditas pertanian dalam Pemilu. Beras selalu menjadi prioritas utama dalam bidang perdangan dan pertanian, sehingga beras menjadi penting untuk menentukan kebijakan (Patunru & Ilman, 2019).

Pentingnya Beras dalam Pandangan poliitk

Penurunan produksi beras dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan dan kesejahteraan petani, karena mata pencaharian mereka sangat bergantung pada produksi beras. Kondisi tersebut mendorong munculnya program swasembada pangan. Swasembada pangan, terutama beras, menjadi program penting di tiap era pemerintahan. Meski status swasembada beras hingga saat ini masih 'samar-samar' dan diwarnai kontroversi. Kenyataannya Indonesia sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia. Namun, produksi beras malah turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Sementara itu, menurut FAO, swasembada berarti jika produksi lokal dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional (Cnbcindonesia.com, 2023). Kebijakan pangan pemerintah di Indonesia bertujuan untuk mencapai swasembada pangan dengan meningkatkan produksi beras, masih belum menunjukan dampak peningkatkan, meski dalam setiap momentum pemilihan janji swasembada pangan selalu mewarnai.

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kebijakan impor beras menjadi salah salah satu kebijakan yang sering dilakukan pemerintah. Pemerintah resmi membuka keran impor sebanyak 500 ribu ton pada November 2022 dalam rapat koordinasi terbatas, dilanjutkan dengan penerbitan surat persetujuan impor (SPI) pertengahan Desember. Kondisi tersebut mengingatkan pada kebijakan serupa pada tahun 2018 yang kedatangan saat panen raya (republika.co.id, 2023). Tahun 2014 impor beras meningkat sebesar 57,79 persen menjadi 388,18 juta dolar AS pada 2014,.Tahun 2007 atau dua tahun sebelum Pemilu 2009. impor beras melambung 252 persen menjadi 467,72 juta dolar AS. Kemudian, meningkatnya impor beras juga terjadi pada 2002 dan 2003. Menjaga stabilitas pangan nasional menjadi salah satu yang kerap dijadikan alasan melakukan impor beras (Putra, 2023). Kondisi tersebut, menempatkan pentingnya beras dalam mempengaruhi pandangan ke pemerintah tentang kebijakan.

Dalam pemilihan umum, beras sering dijadikan alat politisi dengan cara memberi bantuan kepada pendukung. Beras sebagai kebutuhan pangan yang banyak dikonsumsi, menjadi salah satu strategi poliitk yang tepat dalam membangun kepedulian dan dukungan. Beras memainkan peran penting dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga banyak mengalokasikan sebagian besar dari total pengeluaran mereka untuk beras. Artinya kebutuhan beras menjadi penting bagi masyarakat. Melihat peluang tersebut, politisi memberikan bantun beras dan berdampak berkurangnya pengeluaran kebutuhan rumah tangga. ketergantungan beras bagi rumah tangga sangat tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari minimnya rumah tangga mengkonsumsi kebutuhan pokok selain beras. Artinya perubahan harga beras dapat berdampak langsung pada anggaran rumah tangga dan pola konsumsi.

Beras Penentu Rencana Kebijakan Pangan

Indonesia secara strategis memprioritaskan produksi beras yang merupakan simbol kemakmuran yang bermakna bagi masyarakat Indonesia. Bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan dan melegitimasi penerapan kebijakan perdagangan untuk mengutamakan konsumsi (Emond, 2021). Fluktuasi harga dan produksi beras dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat rentan. Artinya kebutuhan kebijakan harga beras dapat memiliki konsekuensi ekonomi makro yang lebih luas. Perubahan harga beras dapat berdampak stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan politik mempengaruhi produksi, harga, penjualan, perdagangan, dan infrastruktur. Sejak tahun 2015 pemerintah telah giat membangun infrastruktur di bidang pertanian, seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi (Cnbcind,2023). Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian**.**

Upaya mengontrol pasokan dan harga beras dapat memberi politisi pengaruh yang signifikan atas pemilih, khususnya di daerah pedesaan dimana pertanian merupakan industri utama. Meksi, implementasi kebijakan beras di Indonesia menghadapi beberapa baik produksi maupun petani. Melalui pemikiran politis, kebijakan beras memiliki implikasi ekonomi. Sehingga, kebijakan tentang beras akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Penting untuk

menghindari masyarakat terutama petani dalam komoditas politik, hal tersebut akan berdampak pada pengabaian terhadap isu penting dihadapi sektor pertanian.

Relasi Beras Sebagai Alat Politik Dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilih

Menjelang Pemilu Tahun 2024, Isu ketahanan pangan yang mencakup beras mengalami peningkatan interasi yang ditandai dengan munculnya perkembangan politisi yang menggunakan padi sebagai sarana perjuangan. Melalui objek sawah atau ladang pertanian sebagai salah satu latar paling sering disebut oleh politisi dalam retorikanya sebagai indiakor keberhasilan (Kustiasih, 2021). Pola relasi yang terbentuk dalam beras dan pemilihan umum meliputi; Pertama, beras telah banyak digunakan sebagai alat dalam kampanye politik. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat kunjungan kerja ke Yogyakarta, memilih datang ke area persawahan dan memberikan dukungan kepada petani milenial (Kustiasih, 2021). Presiden dan menteri pertanian yang melakukan tanam padi di Desa Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditengah ramai tentang impor beras (Cnbcindonesia.com, 2023). Panen padi menjadi representasi puncak yang dilakukan aktor untuk menunjukan kerberhasilan dan kepedulian kepada ketahanan pangan dan petani.

Kedua, menjelang Pemilu, politisi pada masa kampanye mengutarakan berjanji untuk meningkatkan subsidi bagi petani beras atau menerapkan kebijakan untuk menstabilkan harga beras. Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, kedua pasangan calon Presiden menawarkan bebagai program dalam mendukung pangan mulai dari menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga, kesejateraan petani dan inovasi pertanian (Retaduari, 2019; Rillisviva, 2019). Banyak calon Kepala Daerah menjadikan beras menjadi standar kepedulian kepada masyarakat. Tidak sedikit janji yang diutarakan menimbulkan beragam rencana yang tidak dapat terealisasi. Kondisi tersebut tidak terlepaskan posisi tawar beras menjadi komoditi penting bagi politisi dimasa kampanye, sebab beras paling mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, beras sebagai sumber dana menjelang Pemilu, muncul kebijakan impor beras sebagai bagian dalam proses mencari sumber dana. Meski impor beras dinilai sebagai upaya menstabilkan harga, namun menjelang Pemilu kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mudah mendapat dana kampanye. Ketersedian beras, dan dana kampanye dapat mempermudah mempengaruhi keputusan pemilih.

Politik Uang Dalam Komoditas Beras Politik

Pemanfaatan beras sebagai komoditas politik saat Pemilu erat kaitannya dengan praktik politik uang di Indonesia. Praktik tersebut melibatkan pemberian uang atau barang, seperti beras, kepada individu sebagai imbalan atas suara atau dukungan mereka untuk kandidat atau partai politik tertentu. Praktik ini dianggap melanggar aturan kampanye. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membagikan beras kepada masyarakat termasuk dalam kategori politik uang. Selain itu memberikan doorprize, mukenah, jilbab, atau barang lainnya dan ini merupakan pelanggaran pidana Pemilu (Antaranews.com, 2014). Pelaku politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap bisa dijerat sanksi pidana berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bawaslu.go.id, 2015).

Meski memberikan beras pada Pemilu, praktik ini masih banyak dilakukan oleh politisi. Strategi membagi beras dinilai lebih efektif dalam menarik perhatian masyarakat. Terutama pemberian beras kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka. Penggunaan beras sebagai komoditas politik selama Pemilu yang dipandang sebagai bentuk suap, nyatanya praktiknya terus ada menjelang pemilihan baik tingkat lokal maupun nasional. Komoditas beras yang memainkan peran penting dalam politik Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu jika terus dibiarkan dapat berdampak negatif terhadap proses demokrasi. Kondisi tersebut dapat merusak prinsip Pemilu yang bebas, jujur dan adil. Praktik tersebut dapat menimbulkan korupsi dan ketidakmerataan representasi kepentingan rakyat.

Praktik pemberian suap, termasuk beras, selama kampanye Pemilu di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap demokrasi. Pertama, praktik pemberian suap, atau "politik uang", dapat merusak prinsip Pemilihan Umum, serta keterwakilan kepentingan rakyat yang setara

(Lawani, 2021). Praktik pemberian suap dapat berdampak langsung pada konstituen yang mengarah pada pemilihan pemimpin yang belum tentu berkualitas atau mampu, melainkan memberikan uang atau barang paling banyak dipilih (Kpk.go.id, 2021).

Kedua, praktik politik dapat mengakibatnya kurangnya kepercayaan terhadap proses demokrasi dan pemerintah. Memberikan bantuan dalam bentuk apapun menjadi salah satu pelengkap yang harus terpenuhi ketika Pemilihan Umum. Artinya suara pemilih akan sangat ditentukan dengan pemberian, bukan pada kualitas demokrasi yang dibangun. Dalam menegakan demokrasi, dibutuhkan kesadaran kolektif yang mendorong teciptanya Pemilihan Umum yang baik. Badan pengawasan seperti Bawaslu yang bertugas memantau dan mengusut kasus politik uang selama kampanye Pemilu dapat mendorng munculnya Pemilihan Umum tanpa suap. Pencegahan dan pengawasan yang tepat, dapat mendorong munculnya budaya politik yang berdampak pada kehidupan, sebaliknya pembiaran peraktik suap seperti suap beras, dapat menciptakan budaya poliitk yang berdampak pada menurunya kepercayaan dan partisipasi dalam demokrasi. Selain itu, transparansi dana kampanye dapat mendorng penggunaan dana kampanye yang tepat dan membantu mengurangi praktik politik uang. Melalui pendidikan dan kampanye sosialisasi, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif dari politik uang. Dalam rangka mencegah praktik politik uang terutama suap beras dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Diperlukan kerjasama antara lembaga pengawas pemilihan, pemerintah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemanfaatan beras sebagai komoditas politik telah banyak dilakukan politisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Beras sebagai media kampanye dinilai lebih murah biayanya. Politisi menjadikan beras tidak hanya sebatas komoditas pangan, melainkan komoditas strategis dalam politik terutama pada saat Pemilihan Umum. Politisi memilih beras sebagai media kampanye tidak terlepas kegunaan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki nilai penting dalam kehidupan. Dalam konteks lebih luas, beras sering dikaitkan sebagai simbol nasional yang dijadikan tolak ukur keberpihakan politisi kepada masyarakat. Beras dinilai sebagai bentuk representatif kesejahteraan dan gerakan sosial. Pentingnya beras dalam politik Indonesia terlihat dari berbagai janji politiik yang menempatkan rencana kebijakan kusus untuk komoditas beras. Dampak negatif komoditas beras digunakan ke arah politik, dapat menghilangkan bagian penting beras sebagai komoditas pangan. Penting mengembangkan penelitian ini dengan melihat pengawasan penggunaan baras sebagai media kampanye pada Pemilihan Umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, A. (2023). *Setahun Jelang Pemilu, Impor Beras Indonesia Melonjak*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/setahun-jelang-pemilu-impor-beras-indonesia-melonjak

Anggraeni, R. (2013). Politik Beras Di Indonesia Pada Masa Orde Baru: Dari Subsistensi, Swasembada Pangan, Hingga Ketergantungan Impor. *Factum, 347*.

Antaranews.com. (2014). *Bawaslu: Parpol Bagi Beras Masuk Politik Uang - ANTARA News Bangka Belitung*. https://babel.antaranews.com/berita/8312/bawaslu-parpol-bagi-beras-masuk-politik-uang

Bawaslu.go.id. (2015). *Bawaslu Tidak Akan Membiarkan Politik Uang | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tidak-akan-membiarkan-politik-uang

Bps.go.id. (2023). *Pada 2022, luas panen padi mencapai sekitar 10,45 juta hektar dengan produksi sebesar 54,75 juta ton GKG.* https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/2036/pada-2022--luas-panen-padi-mencapai-sekitar-10-45-juta-hektar-dengan-produksi-sebesar-54-75-juta-ton-gkg-.html

Cnbcindonesia.com. (2023). *Tahun Terakhir Jokowi, Swasembada Beras RI Sampai Mana?* https://www.cnbcindonesia.com/news/20230816081527-4-463334/tahun-terakhir-jokowi-swasembada-beras-ri-sampai-mana

Cnbcindonesia.com. (2023). *Di Tengah Ramai Kabar Impor Beras, Jokowi "Nyebur" ke Sawah*.

Emond, T. (2021). *Protectionism in Indonesia: The Politics of Rice – McGill Journal of Political*

Studies. https://mjps.ssmu.ca/2021/03/26/protectionism-in-indonesia-the-politics-of-rice/
Herin, F. P. (2019). *Stiker Caleg Diselipkan dalam Bantuan Beras - Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/15/stiker-caleg-diselipkan-dalam-bantuan-beras
Komara, I. (2019). *Janji Tak Impor Beras, Prabowo Bandingkan Petani RI dengan Jepang*. https://news.detik.com/berita/d-4494980/janji-tak-impor-beras-prabowo-bandingkan-petani-ri-dengan-jepang
Kpk.go.id. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi - ACLC KPK*. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/dampak-korupsi-terhadap-politik-dan-demokrasi
Kumparan.com. (2023). *Didukung PBB Jadi Capres, Prabowo Janji Kerja Keras Jaga Keamanan Pangan RI | kumparan.com*. https://kumparan.com/kumparanbisnis/didukung-pbb-jadi-capres-prabowo-janji-kerja-keras-jaga-keamanan-pangan-ri-20tTmZdj2Gs
Kustiasih, R. (2021). *Panggung Politik Bernama Sawah Pertanian - Kompas.id*.
Lawani, S. (2021). *Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu dan Demokrasi*. https://kab-banggai.kpu.go.id/berita/baca/7807/bahaya-politik-uang-terhadap-pemilu-dan-demokras
Mahardika, M. D. G., & Ramadhan, F. N. (2020). Politik Beras Dan Gerakan Sosial: Resistensi Petani Unra Sulawesi Selatan Masa Kependudukan Jepang 1943. *Jurnal Artefak Vol*, *7*(2).
March, L. (2022). *Desk Research: Complete Guide & Best Practices | Similarweb*. https://www.similarweb.com/blog/research/market-research/desk-research/
Michella, W. (2023). *Anwar Abbas Hubungkan Impor Beras dengan Biaya Pemilu 2024*. https://nasional.sindonews.com/read/1091525/12/anwar-abbas-hubungkan-impor-beras-dengan-biaya-pemilu-2024-1683518738
Muhamad, N. (2023). *Konsumsi Beras Indonesia Terbanyak Keempat di Dunia pada 2022/2023*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/konsumsi-beras-indonesia-terbanyak-keempat-di-dunia-pada-20222023
Owa, M. (2023). *Desk Research: Definition, Types, Application, Pros & Cons*.
Pahlevi, R. (2019). *Mengapa swasembada beras begitu penting dalam imajinasi publik Indonesia*. https://theconversation.com/mengapa-swasembada-beras-begitu-penting-dalam-imajinasi-publik-indonesia-111261
Patunru, A., & Ilman, A. S. (2019). *Political Economy of Rice Policy in Indonesia: A Perspective on the ASEAN Economic Opportunity*. Discussion Paper.
Putra, D. A. (2023). *Dalih Impor Beras: antara Kebutuhan & Kepentingan Jelang Pemilu*. https://tirto.id/dalih-impor-beras-antara-kebutuhan-kepentingan-jelang-pemilu-gEfe
Refiyanto, R. (2021). Kini Dan Dulu: Beras Dalam Perkembangan Politik Ekonomi Dan Refleksi Historiografi Indonesia. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, *12*(1).
Republika.co.id. (2023). *Pemilu Mau Datang, Beras Melonjak Lagi | Republika Online*. https://ekonomi.republika.co.id/berita/rpj1pm1125000/pemilu-mau-datang-beras-melonjak-lagi
Retaduari, E. A. (2019). *Janji Prabowo-Sandi di Bidang Pangan: Danai Petani Hingga Turunkan Harga Telur*. https://news.detik.com/berita/d-4431190/janji-prabowo-sandi-di-bidang-pangan-danai-petani-hingga-turunkan-harga-telur
Reza, B. (2014). *Jokowi Janji Hentikan Impor Beras dan Bawang - Pemilu Tempo.co*. https://pemilu.tempo.co/read/588738/jokowi-janji-hentikan-impor-beras-dan-bawang
Rillisviva. (2019). *Sinergitas Janji Kampanye Jokowi dan Prabowo di Bidang Pertanian*. https://www.viva.co.id/vstory/lainnya-vstory/1185103-sinergitas-janji-kampanye-jokowi-dan-prabowo-di-bidang-pertanian?page=all
Setyaningrum, P. (2022). *Alasan Indonesia Disebut Negara Agraris, Salah Satunya Ekonomi Ditopang Oleh Petani*. https://regional.kompas.com/read/2022/08/03/215851878/alasan-indonesia-disebut-negara-agraris-salah-satunya-ekonomi-ditopang-oleh
Surveysparrow.com. (2023). *A Pocket Guide to Desk Research: Definitions, Methods and Examples*. https://surveysparrow.com/blog/desk-research/#section1